



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini menyediakan hasil kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang di dalamnya menggambarkan tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan dan pencapaian program kegiatan, laporan ini dapat diselesaikan berkat kerjasama yang baik antar bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

Dengan, tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan jawaban serta tantangan atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana pembangunan kedepan. Namun tetap disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diperlukan dan diharapkan.

Pelaihari, Januari 2025



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut,

Eko Trianto, S.Sos

Rebina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670601 199401 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang - undang	1
b. Data Geografis wilayah.....	1
c. Jumlah Penduduk.....	7
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	8
e. Gambaran Umum Dinas Sosial.....	9
f. Struktur Organisasi.....	9
g. Kepegawaian.....	12
h. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	13
i. Realisasi Anggaran Belanja Daerah.....	14
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	15
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	16
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	19
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	19
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintah.....	19
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	23
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	27
2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	27
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	28
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	34
3.1 Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah/Provinsi ...	34
3.2 Tugas Pembantuan yang diberikan	34
BAB IV PENETAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	35
4.1 Urusan Bidang Sosial	35

4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	35
4.1.2	Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah....	36
4.1.3	Alokasi Anggaran.....	38
4.1.4	Permasalahan dan Solusi.....	40
BAB V	PENUTUP	42
	Kesimpulan	42
	Saran-Saran	44
	Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar nama ASN Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
2. Daftar rincian Pejabat Eselonering Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
3. Daftar ASN Dinas Sosial yang mengikuti DIKLAT di Tahun 2024
4. Lampiran KIB (Kartu Inventaris Barang)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Tanah Laut Tahun 2024-2026.....	9
.....	
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
j. Undang - undang	1
k. Data Geografis wilayah.....	1
l. Jumlah Penduduk.....	7
m. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	8
n. Gambaran Umum Dinas Sosial.....	9
o. Struktur Organisasi.....	9
p. Kepegawaian.....	12
q. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	13
r. Realisasi Anggaran Belanja Daerah.....	14
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	15
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	16

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	7
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN.....	35
PEMERINTAHAN DAERAH.....	35
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	35
2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	35
2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	36
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	38
2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	39
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	44
3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima	45
3.2 Tugas Pembantuan Yang Di Berikan	45
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL	46
4.1 Bidang Urusan Sosial.....	46
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	46
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	47
4.1.3 Realisasi	51
4.1.4 Alokasi Anggaran.....	62
4.1.5 Dukungan Personil.....	66
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	67
BAB V PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Wilayah Tanah Laut merupakan kewedanaan yang berada di dalam Daswati II Banjar yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta kekayaan alam lainnya.

Pada saat itu, Tanah Laut memiliki potensi yang cukup besar namun belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang demikian tersebut dan sejalan dengan adanya beberapa kewedanaan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Daswati II, membangkitkan semangat dan keinginan yang kuat bagi tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedanaannya menjadi Daswati II.

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" - 115°20'00" Bujur Timur dan 3°30' 33" - 4°10' 30" Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah

menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Utara : Kota Banjarbaru
Selatan : Laut Jawa
Timur : Kabupaten Tanah Bumbu
Barat : Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
 - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
 - Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
 - Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
 - Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
 - Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
 - Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan).

Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0 – 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan)
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan)
4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan)
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan)
6. 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan)

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak

Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisolhanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya

keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).

3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80 – 90 cm), dangkal (30 – 60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh

terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspilasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance* nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabuhur (190 Km²), Sungai Swarangan (580 Km²). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah/district timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.
2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu

kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

c. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 memiliki 6 Program, 14 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.681.349.495,- dengan rincian belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai anggaran Rp. 4.281.144.053 terealisasi sebesar Rp. 3.679.187.607 atau 85,94 %.
2. Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 3.988.858.267 terealisasi sebesar Rp. 3.564.604.541 atau 89,36 %.
3. Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp. 3.757.173.000 terealisasi sebesar Rp. 2.629.440.000 atau 69,98 %.

Belanja Modal

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin anggaran Rp. 531.428.534 realisasi Rp. 499.085.250 atau 93,91 %.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan anggaran Rp. 72.745.641 realisasi Rp. 70.933.786 atau 97,51 %.
3. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 50.000.000 terealisasi 36.400.000 atau 72,80 %.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut

Sebagaimana diketahui bahwa Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 ialah **Teknoratik**.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasi menjadi 3 tujuan dengan 19 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*). Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	70,35	70,4 - 70,72	70,80	71	71,30	71,30
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	12,35	12,37	12,39	12,4	12,4
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,95	8,05	8,15	8,25	8,25
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70,00	70,00
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	22.22	30	40	45	50	50
			Persentase atlet berprestasi	86.97	85	85	90	95	95
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	87,28	87,30	87,32	87,34	87,36	87,36
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0
			Gini Ratio	0,263	0,230	0,229	0,228	0,227	0,227
			Angka Kemiskinan	3,86	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	2,70	3,80	2,85	2,9	2,95	2,95
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,86	3,48	3,52	3,55	3,58	3,58
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,10	4,81	4,9	4,95	5,0	5,0

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata (akomodasi dan Makan Minum)	6,54	12,10	11,75	11,70	11,70	11,70
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	83,91	5	5	5	5	5
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49	60,49
	2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	IKLH	67,78	68,47	68,57	68,67	68,77	68,77
			Indeks Resiko Bencana	156,33	153,2	150,1	147	144	144
	2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	13,32	15	17,5	20	22,5	22,5
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82,06	82,3	82,6	82,8	83	83
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0.707	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60,19 (Baik)	61	62	63	65	65
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	67.28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)	80.01 (A)
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,38 (SPP)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	76 (Baik)

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
			2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A	4,57 / A
3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,11	3,15	3,2	3,4	3,6	3,6

Selanjutnya penjabaran dari 3 tujuan dan sasaran diatas dapat diuraikan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Membangun sinergitas antar Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Dinas Sosial kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus bersinergi dengan perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah sehingga mereka mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal atau budaya setempat.

2. Bersinergi untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial juga harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal ini PSM, TKSK, Penyuluh Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Tagana, dan relawan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan kepada PSKS dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dan meningkatkan partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian dalam pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban pemerintah daerah saja tetapi juga dengan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam PSKS.

3. Bersinergi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.

Pelayanan sosial masyarakat, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi. Basis teknologi ini dapat dimulai dengan pelayanan Data PPKS dan bantuan serta pelayanan yang diberikan. Kemajuan teknologi tentunya harus di manfaatkan dalam system Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik dalam pendataan PSKS, Sistem Informasi serta penyaluran bantuan sosial yang menggunakan system teknologi.

b. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan cara dan bagaimana untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused - management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2019-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pembangunan Urusan Sosial diarahkan pada upaya peningkatan aksesibilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan ketahanan sosial Individu, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang cacat, eks Napza, keluarga miskin, wanita rawan sosial, komunitas adat terpencil dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial dan jaminan kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam rangka Pelaksanaan urusan wajib tentang pelayanan dasar pada Dinas sosial tentu tidak terlepas pada Program dan kegiatan dan tentunya dapat kita melihat kondisi secara umum masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar bermata pencaharian petani dan

masih banyak yang tergolong sebagai masyarakat miskin, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan secara ekonomi masyarakat miskin, lansia, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar , anak jalanan, gelandangan, pengemis , wanita rawan sosial dan kelompok rentan sosial lainnya serta meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, Orsos/LSM. Pemberdayaan dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan, dan bantuan pendidikan/ pelatihan keterampilan berusaha agar mampu dan mandiri.

Secara umum pelaksanaan pembangunan urusan sosial telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatkan pengembangan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan kerukunan serta kedamaian antar umat beragama melalui forum dialog dan kerjasama dibidang sosial dan agama.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada serta sedang berkembang sekaligus mengacu pada visi, misi dan tujuan Dinas Sosial, maka ada **4 (empat) strategi inti** yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama lima tahun : **pertama**, perluasan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS; **kedua**, memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upaya-upaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, masyarakat, dan dunia usaha; **ketiga**, perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar : **keempat**, perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.

c. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dalam pelaksanaan tugas pembangunan, baik pelayanan kepada masyarakat melalui Pembinaan, Penyuluhan dan Pendampingan pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat Otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Kesejahteraan Sosial, yang berpedoman kepada kebijakan Pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara profesional dan sungguh-sungguh. Adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah-masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya.

Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 dipimpin oleh seorang kepala Dinas Sosial yang dibantu oleh :

- 1) Sekretariat
- 2) 2 (dua) Kepala Bidang yaitu :
 - a. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin

Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat
Meliputi penyusunan perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja, administrasi keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) sub Bagian meliputi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bertugas memberikan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi program dan kegiatan serta pelaporan.

2) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dan eks trauma, anak terlantar, lanjut usia, penanganan orang terlantar, pemulangan eks narapidana, penyalahgunaan Napza, perlindungan sosial anak, korban bencana, akses jaminan sosial, dan penunjang Program Keluarga Harapan serta anak berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sosial melalui Sekretaris Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) seksi antara lain :

a. Seksi Rehabilitasi Sosial

b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

c. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Meliputi pemberdayaan keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, kelembagaan dan organisasi sosial, pemberdayaan PSM, TKSK, dan verifikasi dan validasi basis data terpadu.

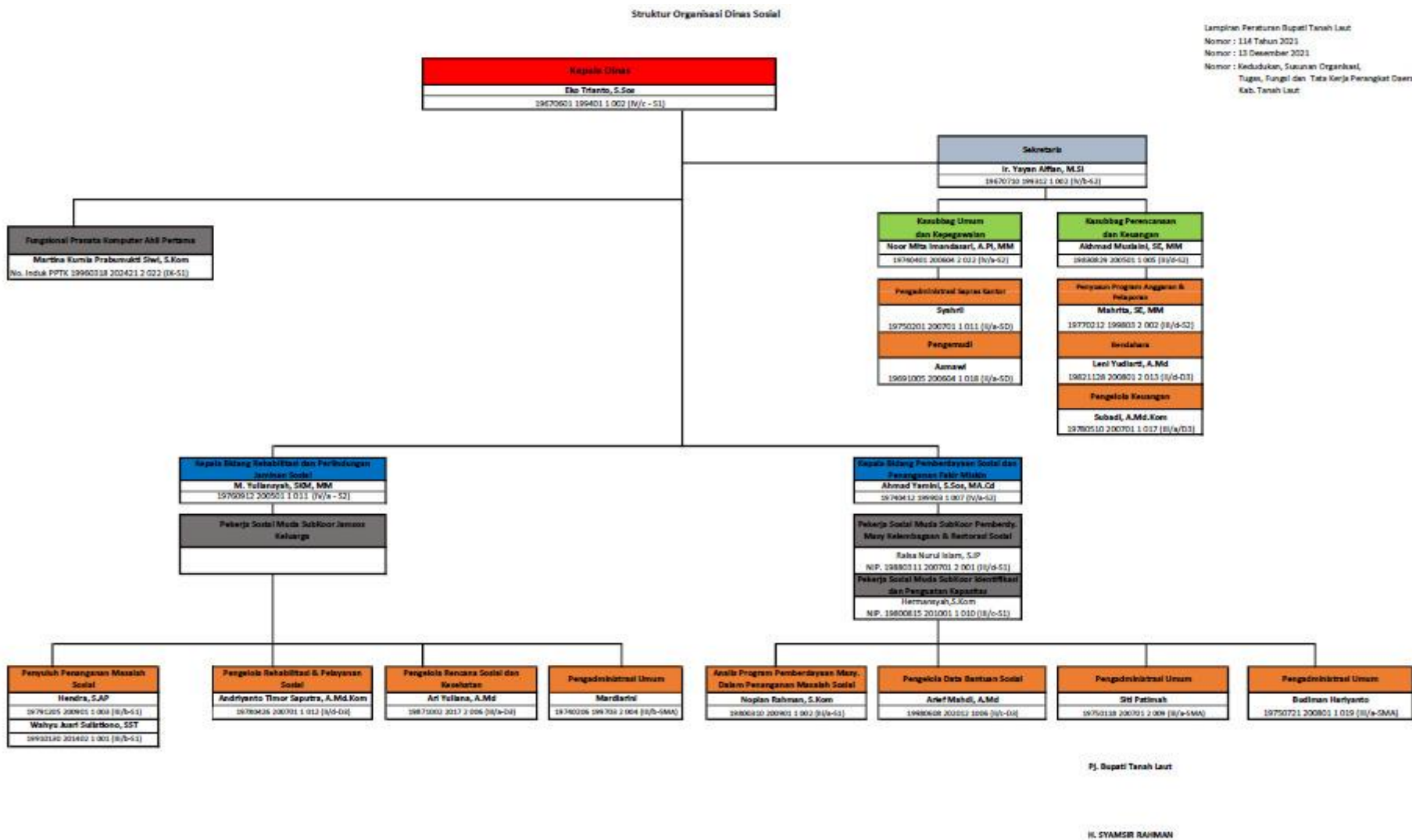
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) sub seksi yaitu :

a. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan & Restorasi sosial;

c. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar (dibawah ini) :



d. Kepegawaian

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Organisasi perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah ASN yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut saat ini sebanyak 22 (dua puluh dua) orang PNS, 1 (satu) orang PPPK dan 15 (lima belas) Pegawai Non ASN.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruan g	Kadis	Sekretariat	Bid. Pemd Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & Prindngn JamSos	Jumlah
1	ASN						22
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-	1
-	Pembina Tk.I	(IV/b)	-	1	-	-	1
	Pembina	(IV/a)	-	1	1	1	3
	Penata Tingkat I	III/d	-	2	1	-	3
	Penata	III/c	-	-	1	1	2
	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	1	2	3
	Penata Muda	III/a	-	1	2	2	5
	Pengatur Tk.I	II/d	-	1	1	-	2
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	2	-	-	2
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-
2	PPPK	-	-	1	-	-	1
3	Non ASN	PTT	-	15	-	-	15

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan :

Pegawai menurut Status dan Tingkat Pendidikan

NO	Status Kepegawaian	JUMLAH
1	P N S	
	Strata 2	7
	Strata 1	5
	Diploma III/IV	5
	SMA/Sederajat	3
	SMP/Sederajat	-
	SD/Sederajat	2
	TOTAL	22
2	PPPK	
	Strata 1	1
3	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	
	Strata 1	3
	Diploma III/IV	2
	SMA/Sederajat	7
	SMP/Sederajat	1
	SD/Sederajat	2
	TOTAL	15

e. Kondisi Sarana dan Pra sarana

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Pada tahun 2024 untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dapat dikatakan masih kurang dalam hal sarana operasional yakni Mobil untuk operasional Pelayanan Kegiatan Dinas Sosial.

f. Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada sasaran, dapat berikut ini :

**Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Tahun 2024**

No.	Program (sesuai Kepmendagri 050-5889)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.942.257
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.999.811
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.281.144.053
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 4.999.781
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.151.192
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 23.677.917
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 2.996.674

			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp 3.892.707
			Penyediaan Bahan/Material	Rp 16.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 249.996.618
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 296.478.824
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 802.843.968
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 200.000.000

			operasional atau lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 17.000.000
			Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp 49.824.000
			Pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 14.805.130
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Rp. 3.993.081
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 38.904.412
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 185.395.509

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 248.780.201
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp 3.654.892.485
			Alat Bantu	Rp 39.993.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 49.989.171
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 224.485.625
			Pemberian Layanan Rujukan	Rp 5.000.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 19.939.776
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp 19.999.696
			Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Rp 29.999.868

		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Rp 249.925.328
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Rp 374.962.745
			Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 63.955.022
			Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 109.972.065
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp 1.377.028.266
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Rp 44.153.534
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 79.611.759
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Rp 72.745.641
			Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Rp 100.081.111
				Rp 13.001.561.627

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2024**

No.	Program (sesuai Kepmendagri 050-5889)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
						Pagu	%	Pagu	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penggangan n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4,942,257	Rp 5,942,065	Rp 5,561,000	93.59	Rp 381,065	7.71
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4,999,811	Rp 5,952,021	Rp 5,763,900	96.84	Rp 188,121	3.76
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,281,144,053	Rp 4,281,144,053	Rp 3,679,187,607	85.94	Rp 601,956,446	14.06
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Rp 4,999,781	Rp 5,997,449	Rp 5,296,400	88.31	Rp 701,049	14.02

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,151,592	Rp 3,320,662	Rp 2,975,000	89.59	Rp 345,662	16.07
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 23,677,917	Rp 43,637,014	Rp 39,765,360	91.13	Rp 3,871,654	16.35
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 2,996,674	Rp 3,661,724	Rp 3,310,020	90.40	Rp 351,704	11.74
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3,892,707	Rp 13,724,608	Rp 13,068,500	95.22	Rp 656,108	16.85
			Penyediaan Bahan/Material	Rp 16,000,000	Rp 16,000,000	Rp 14,900,000	93.13	Rp 1,100,000	6.88
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 249,996,618	Rp 349,946,618	Rp 349,380,945	99.84	Rp 565,673	0.23

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	100.00	Rp -	0.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 296,478,824	Rp 161,478,824	Rp 99,107,279	61.37	Rp 62,371,545	21.04
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 802,843,968	Rp 752,843,968	Rp 711,402,596	94.50	Rp 41,441,372	5.16

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30,000,000.00	Rp 35,000,000	Rp 34,866,000	99.62	Rp 134,000	0.45
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp 200,000,000	Rp 210,000,000	Rp 209,973,466	99.99	Rp 26,534	0.01
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 16,850,000	99.12	Rp 150,000	0.88
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp 49,824,000	Rp 49,824,000	Rp -	0.00	Rp 49,824,000	100.00

			Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp 14,805,130	Rp 14,805,130	Rp	0.00	Rp 14,805,130	100.00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi/penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Rp 3,993,081.00	Rp 3,993,081.00	Rp 3,993,000.00	100.00	Rp 81.00	0.00
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 38,904,412	Rp 38,904,412	Rp 36,040,100	92.64	Rp 2,864,312	7.36
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 185,395,509	Rp 185,395,509	Rp 161,446,450	87.08	Rp 23,949,059	12.92

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 248,780,201	Rp 248,780,201	Rp 229,993,800	92.45	Rp 18,786,401	7.55
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Perumahan	Rp 3,654,892,485	Rp 3,654,892,485	Rp 2,543,170,000	69.58	Rp 1,111,722,485	30.42
			Alat Bantu	Rp 39,993,000	Rp 39,993,000	Rp 32,020,000	80.06	Rp 7,973,000	19.94
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 49,989,171	Rp 49,989,171	Rp 47,163,335	94.35	Rp 2,825,836	5.65

			Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 224,485,625	Rp 224,485,625	Rp 197,173,400	87.83	Rp 27,312,225	12.17
			Pemberian Layanan Rujukan	Rp 5,000,000	Rp 7,000,000	Rp 3,890,000	55.57	Rp 3,110,000	62.20
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 19,939,776	Rp 19,939,776	Rp 14,655,000	73.50	Rp 5,284,776	26.50
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rp 19,999,696	Rp 19,999,696	Rp 1,410,000	7.05	Rp 18,589,696	92.95
			Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Rp 29,999,868	Rp 29,999,868	Rp 26,245,000	87.48	Rp 3,754,868	12.52
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 249,925,328	Rp 249,925,328	Rp 248,820,000	99.56	Rp 1,105,328	0.44

			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Rp 374,962,745	Rp 424,962,745	Rp 403,801,000	95.02	Rp 21,161,745	5.64
			Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 63,955,022	Rp 77,301,551	Rp 70,060,320	90.63	Rp 7,241,231	11.32
			Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 109,972,065	Rp 124,952,065	Rp 116,859,950	93.52	Rp 8,092,115	7.36
5	PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp 1,377,028,266	Rp 983,548,801	Rp 861,866,470	87.63	Rp 121,682,331	8.84

			Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Rp 44,153,534	Rp 72,569,534	Rp 71,516,000	98.55	Rp 1,053,534	2.39
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 79,611,759	Rp 79,611,759	Rp 74,482,700	93.56	Rp 5,129,059	6.44
6	PROGAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sarana dan Prasarana Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 72,745,641	Rp 72,745,641	Rp 70,933,786	97.51	Rp 1,811,855	2.49
			Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 100,081,111	Rp 100,081,111	Rp 70,702,800	70.65	Rp 29,378,311	29.35
				Rp 13,001,561,627	Rp 12,681,349,495	Rp 10,479,651,184	82.64	Rp 2,201,698,311	16.93

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No IKK	Data yang diperlukan	Jumlah	Capaian	Keterangan Sumber Data
40	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2439	69,68 %	Dinsos
	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	3500		Dinsos
41	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	6427	100 %	Dinsos
	populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	6427		Dinsos

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	SLRT Rumah Singgah Ayangjuki	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	DINSOS	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	TRC Bencana TRC PPKS	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2439	DINSOS dengan rincian Penyandang Disabilitas = 456 Anak Terlantar = 17 Lanjut Usia = 1966	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	DINSOS	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	DINSOS	
		7	Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINSOS	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	DINSOS	

	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	8	DINSOS	
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1	DINSOS	
	11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	DINSOS	
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	DINSOS	
	13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	5	DINSOS	
	14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	3	DINSOS	
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	20	DINSOS	
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	DINSOS	
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	10	DINSOS	
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses	7	DINSOS	

			layanan pendidikan dan Kesehatan dasar			
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan	47	DINSOS	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	38	DINSOS	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	75	DINSOS	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	5258	DINSOS	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	120	DINSOS	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	3	DINSOS	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	DINSOS	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	5258	DINSOS	
		6	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	28	DINSOS	

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian indikator Persentase PPKS tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	%	17,06	17,5	97,5
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	73,95	75(B)	98,6

Capaian Indikator Kinerja Utama :

Angka PPKS yang Mandiri pada Tahun 2024 mencapai 97,5% hampir mendekati angka 100 % menunjukkan bahwa persentase PPKS yang menjadi mandiri sudah relatif besar dan kekurangan 2,5% yang tidak mencapai target tidak berpengaruh secara signifikan kinerja Kepala Dinas.

Nilai SAKIP Dinas Sosial di Tahun 2024 sebesar 73,95 sedikit mengalami peningkatan dari Nilai SAKIP di Tahun 2023 yaitu 73,26.

Tabel 2.4
DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024

No.	JENIS PPKS	POPULASI			Persentase (%)
		YANG ADA	Tertangani	Mandiri	Tertangani
1	Anak Balita Terlantar	2	2	0	100%
2	Anak Terlantar	60	23	23	38%
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0	24	24	0%
4	Anak Jalanan	0	0	0	0%
5	Anak dengan Kedisabilitasn (ADK)	89	89	89	100%
6	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	5	5	5	100%
7	anak yang memerlukan perlindungan khusus	3	3	3	100%
8	Lanjut Usia Terlantar	1.966	1.966	0	100%
9	Penyandang Disabilitas	619	483	40	78%
10	Tuna Susila	0	0	0	0%
11	Gelandangan	0	23	23	0%
12	Pengemis	0	0	0	0%

13	Pemulung	0	0	0	0%
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0%
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	0	0	0	0%
16	Orang dengan HIV/AIDS	0	0	0	0%
17	Korban Penyalahgunaan Napza	0	0	0	0%
18	Korban Trafficking	0	0	0	0%
19	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0%
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	0%
21	Korban Bencana Alam	7.000	6.427	5.216	92%
22	Korban Bencana Sosial	0	120	82	0%
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.869	28	28	1%
24	Fakir Miskin	3.194	2.258	0	71%
	PKH	7.164	7.034	84	98%
	BPNT	9.940	9.842	0	99%
25	Keluarga bermasalah sosial psikologi	0	0	0	0%
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0%
Jumlah		32.911	28.327	5.614	
		JIWA	JIWA	JIWA	

PPKS YANG TERTANGANI

Formulasi Pengukuran :
PPKS yang tertangani : $\text{Populasi PPKS} \times 100\%$

86,07

PPKS YANG MANDIRI

PPKS mandiri : $\text{Populasi PPKS} \times 100\%$

17,06

Dari 26 jenis PPKS tersebut di atas hanya sekitar 12 (Dua belas) jenis PPKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Dapat dijelaskan bahwa terdapat 32.911 Jiwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tanah Laut.

PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Korban bencana Alam dan juga Fakir Miskin.

Berikut jumlah PPKS yang dapat ditangani melalui Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2024 :

Adapun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	NAMA PSKS	YANG ADA	YANG AKTIF
1	PSM	50	25
2	TKSK	11	11
3	Karang Taruna	135	135
4	Puskesmas	49	49

5	Penyuluh Sosial Masyarakat	29	24
6	TAGANA	28	28
7	pendamping PKH	35	35
8	Pendamping Rehabilitasi Sosial	4	4
Jumlah		341	311

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tanah Laut yang terdaftar dan bersertifikat sebanyak 8 lembaga atau sekitar 341 orang namun yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial hanya 311 orang atau sekitar 91,2 %.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah yang hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas. Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah.

3.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

(SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud).

3.2 Tugas Pembantuan Yang Di Berikan

(SKPD Dinas Sosial tidak menyelenggarakan kegiatan dimaksud).

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Sosial

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluarpanti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara :

- a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Tabel 4.1

No	Pelayanan Dasar	Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 tercantum dalam tabel 4.2 berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi	100%

	luar panti	kebutuhan dasarnya dluar panti	
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	100%

Sedangkan Pembiayaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dipergunakan dalam bentuk pelayanan :

- a. Penyediaan Permakanan;
- b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual Dan Sosial;
- c. Layanan Kedaruratan;
- d. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- e. Penyediaan Makanan
- f. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut :

No	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	100 %	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti	100%	
	- Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3500 Orang	Rp. 3.654.892.485
	- Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu/alat bantu peraga kewenangan kabupaten/kota	7 orang	Rp. 39.993.000

	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp. 49.989.171
	- Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	73 orang	Rp. 224.485.625
	- Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	2 orang	Rp. 7.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	
	- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	100%	
	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	Rp. 19.939.776
	- Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan kewenangan kabupaten/kota	25 orang	Rp. 19.999.696
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	100%	

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang ditangani	100%	
	- Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 jiwa	Rp. 983.548.801
	- Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	21 unit	Rp. 72.569.534
	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota			
	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan TAGANA kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	Rp. 79.611.759

4.1.3 REALISASI PENCAPAIAN SPM

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	

01.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	644	644	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	6	6	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	600	600	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	3	3	0	100.00 %	

(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)						
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	5	5	0	100.00 %	
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	5	5	0	100.00 %	
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	0	100.00 %	
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %	
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %	

	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
02.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	182	182	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	60	60	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	20	20	0	100.00 %	

(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)						
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %	
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	20	20	0	100.00 %	
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	20	0	100.00 %	
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	0	100.00 %	
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2	2	0	100.00 %	
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %	

	(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)						
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %	
03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2964	2964	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	10	10	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	2879	2879	0	100.00 %	

(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)						
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	4	4	0	100.00 %	
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10	10	0	100.00 %	
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	10	10	0	100.00 %	
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0	100.00 %	

	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %	
04.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38	38	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	38	38	0	100.00 %	

layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial						
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	38	38	0	100.00 %	
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	38	38	0	100.00 %	
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	38	38	0	100.00 %	
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	38	38	0	100.00 %	
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	38	38	0	100.00 %	

	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	38	38	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	38	38	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	38	38	0	100.00 %	
05.00	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10000	10000	0	100.00 %	

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)		Orang	10000	10000	0	100.00 %
2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)		Orang	230	230	0	100.00 %
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)		Unit	11	11	0	100.00 %
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)		Orang	2500	2500	0	100.00 %
5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)		Orang	2500	2500	0	100.00 %

4.1.4 Alokasi Anggaran

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut :

No	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu	Sumber dana
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial	100 %	100 %		APBD
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan / atau rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100 %		APBD
	- Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/K	3500 Orang	2439 orang	Rp. 3.654.892.485	APBD

		ota				
	- Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	7 orang	7 orang	Rp. 39.993.000	APBD
	- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 orang	Rp. 49.989.171	APBD
	- Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	73 orang	73 orang	Rp. 224.485.625	APBD
	- Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten kota	4 orang	2 orang	Rp. 7.000.000	APBD
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %		APBD
	- Pemeliharaan Anak-Anak Terlanta	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	100%	33,3%		APBD

	r					
	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	Rp. 19.939.776	APBD
	- Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	25 orang	25 orang	Rp. 19.999.696	APBD
	PROGR AM PENAN GANAN BENCA NA	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial selama tanggap darurat bencana	100%	100%		APBD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang ditangani	100%	100%		APBD
	- Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 jiwa	10.000 jiwa	Rp. 983.548.801	APBD

		ota				
	-Penyediaan Tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	21 unit	21 unit	Rp. 72.569.534	APBD
	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota					APBD
	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan TAGANA kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang	Rp. 79.611.759	APBD

4.1.5 Dukungan Personil

Tabel 4.1 Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Presentase Penyandang Disabilitas Dasar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	236 (24 PNS dan 15 Non PNS, 11 TKSK, 26 TAGANA, 135 Desa dan 5 Kelurahan Karang Taruna dan 20 PSM)
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Presentase Anak Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	236 (24 PNS dan 15 Non PNS, 11 TKSK, 26 TAGANA, 135 Desa dan 5 Kelurahan Karang Taruna dan 20 PSM)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Presentase Lanjut Usia Terlantar Luar Panti yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	236 (24 PNS dan 15 Non PNS, 11 TKSK, 26 TAGANA, 135 Desa dan 5 Kelurahan Karang Taruna dan 20 PSM)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Presentase Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	236 (24 PNS dan 15 Non PNS, 11 TKSK, 26 TAGANA, 135 Desa dan 5 Kelurahan Karang Taruna dan 20 PSM)

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Presentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	236 (24 PNS dan 15 Non PNS, 11 TKSK, 26 TAGANA, 135 Desa dan 5 Kelurahan Karang Taruna dan 20 PSM)
---	--	--	--

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tanah Laut yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 di tunjukkan pada tabel berikut:

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024

No.	NAMA PSKS	YANG ADA	YANG AKTIF
1	PSM	50	25
2	TKSK	11	11
3	Karang Taruna	135	130
4	Puskesmas	49	49
5	Penyuluh Sosial Masyarakat	29	24
6	TAGANA	28	26
7	Pendamping PKH	36	36
8	Pendamping Rehabilitasi Sosial	4	4
Jumlah		342	305

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut khususnya pada bidang yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai sebagai contoh di Rumah Singgah Ayangjuki belum tersedia sarana seperti kamar yang memadai;
3. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi contoh : Jabatan Fungsional pekerja sosial belum terisi;
4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial terhadap ASN yang bukan lulusan sosial.

b. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

1. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum Optimalnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Dunia Usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah rawan bencana (banjir, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung) sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 antara lain :

- a. Mengoptimalkan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dunia Usaha (CSR Perusahaan) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut misalnya dalam bentuk dukungan dari sisi anggaran terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap PPKS seperti Rumah Singgah yang representatif.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 selain merupakan kewajiban perundang-undangan, maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024, termasuk capaian kerjanya.

Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Laporan Tahunan SPM Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.